
**PENGARUH KODE ETIK APIP TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA**

Engelita O. Kneefel¹, Jullie J. Sondakh², Lidia Mawikere³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : engelita.kneefel@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to and analyze the effect of APIP Ethical Codes (Integrity, Objectivity, Privacy, and Capability) through the performance of auditor in Maluku Utara Provincial Inspectorate which used quantitative method, with the multiple regression models. The research population is 44 Auditors and sampel is 44 Auditors. Primary data obtained by quistionaire distribution throughout 44 respondents which all fullfiled and operable. Independent variable of this research is APIP Ethical Codes (Integrity, Objectivity, Privacy, and Capability), and dependent variable is government performance of auditor. Regards to the result, therefore variable that APIP Ethical Codes simultaneously affect the government performance of auditor and partial that variable Objectivity affect the government performance of auditor, whereas variable Integrity, Privacy, and Capability rejected government performance of auditor.

Keywords : Integrity, Objectivity, Privacy, Capability, And Performance Of Auditor

1. PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh dunia. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban secara terus-menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (good governance), dikarenakan pemerintah selalu digambarkan sebagai birokrat yang panjang dan memiliki tingkat praktik korupsi yang parah. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance Sugmadilaga et al (2015).

Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipasti kepada rezim pemerintahan yang ada Masran et al (2012). Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahnya yang belum siap dengan sistem pemerintah yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik Putra (2016). Contohnya kasus yang terjadi di Provinsi Maluku Utara baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan temuan terjadinya korupsi pajak kendaraan bermotor di kantor Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Ternate. Selain itu, ada juga kasus dugaan suap mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX (Maluku dan Maluku Utara).

Menurut peraturan permendagri nomor 60 tahun 2008 yang membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri dari review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana ada rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi. Tujuan ditetapkan PP nomor 60 tahun 2008 ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efisiensi dan efektivitas tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui PP nomor 60 tahun 2008 ini pemerintah mendorong agar terciptanya pengendalian intern dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan negara untuk dapat mengantisipasi resiko terjadinya kerugian negara serta untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Kode Etik APIP dalam peraturan menteri negara pendayagunaan (PERMENPAN) nomor PER/04/M.PAN/03/2008 sebagaimana dimaksud pada diklum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Dalam APIP ini auditor harus mematuhi dari setiap prinsip-prinsip perilaku yang ada yaitu : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Cut erina (2012).

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan, wewenang, pemborosan dan kebocoran. Pengawasan intern pemerintah adalah fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku Priyansari et al (2014).

Profesi sebagai seorang auditor memiliki tanggungjawab terhadap tugas pengawasan yaitu audit yang mereka lakukan untuk menjaga profesionalisme kinerja yang dilaksanakan, sehingga dapat menghasilkan hasil audit yang kompeten dan reliabel (dapat dijamin kesahiannya). Kinerja suatu profesi dapat diukur dari standar yang telah ditetapkan, dimana kualitas berkaitan dengan mutu kinerja yang dihasilkan dan kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan Bolang (2013).

Audit bukan hanya semata-mata untuk kepentingan klien, namun juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, seperti investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan pengguna audit mengharapkan bahwa laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia Mustikawati (2013). Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks Yadnya et al (2017). Konsep counterfactual reasoning menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap konsep ini akan meningkatkan kesadarannya dalam mengelola informasi dan memecahkan masalah Hoeck V.N (2014).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi

Menurut perundang-undangan yang berlaku dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1 pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atau hasilnya serta penyajian laporan. Sedangkan Pemerintahan pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan atas serta penginterpretasian atas hasilnya. Saat ini PP No. 24 tahun 2005 telah direvisi oleh pemerintah dengan dikeluarkan PP No. 71 tahun 2010.

Dengan melihat pengguna informasi akuntansi tersebut, maka akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Akuntansi Keuangan

Merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi secara umum bagi para pemakai atau pengambil keputusan yang ada diluar organisasi. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

2. Akuntansi Manajemen

Merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi khusus bagi para pengambil keputusan (misalnya manajer) yang ada di dalam organisasi, baik berupa informasi keuangan dan non keuangan. Informasi akuntansi manajemen yang dihasilkan tidak harus berdasarkan PABU, akan tetapi dapat berdasarkan asumsi atau kebijakan dari internal organisasi guna mendukung, proses pengambilan keputusan sebuah divisi dalam internal organisasi.

2.2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya Wiratna (2015:1).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja Mardiasmo (2009:14). Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi non profit lainnya.

i. Peran Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan negara,
- b. Pelaporan keuangan,
- c. Pemeriksaan,
- d. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan Mahmudi (2011 : 16).

ii. Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam

akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Standar akuntansi pemerintah di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi pemerintah di Indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari peraturan standar akuntansi lama dalam PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sedangkan PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh (*full accrual*).

iii. Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah, hal yang menggaris bawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai Einvani et al (2012). Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik, informasi keuangan ini berfungsi sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan Fidelius (2013). PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna Lillrank (2003). Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai entitas, ekonomi terutama mengenai keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Beest, Braam dan Boelens, 2009). Sedangkan tujuan utama umum pelaporan keuangan terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat;
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.

2.3. Etika

Etika berangkat dari kata ethos dalam bahasa Yunani, yang berarti “Karakter”. Sebagian arti lain dari etika adalah moralitas, yang berasal dari bahasa Latin *mores*, yang

berarti “Kebiasaan”. Jadi etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara : 1) Auditor dengan rekan sekerjanya, 2) Auditor dengan atasannya, dan 3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya), serta 4) Auditor dengan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 menyebutkan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kode Etik merupakan sistem prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang diterapkan dan wajib ditaati oleh para anggotanya. Kode Etik berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tertentu. Definisi lain dari Kusmanadji (2004 : 1) mengatakan bahwa etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai : 1) Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia, sebagai manusia, harus hidup baik, dan 2) Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

2.4. Etika Profesi Auditor

Sebuah profesi membebankan etika profesi terhadap anggotanya yang secara sukarela menerima standar profesional perilaku yang lebih keras daripada hukum. Dalam beberapa negara, dewan-dewan akuntansi membebani standar etika yang hampir sama, seperti yang dikeluarkan oleh AICPA, SEC, PCAOB, dan di Indonesia, terdapat IAI, APIP dan lain-lain. Alasan yang mendasari setiap profesi menuntut para anggotanya (para profesional) bertindak atau menjalankan kewajiban profesinya dengan standar etika yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan masyarakat sehubungan dengan kualitas jasa yang diberikan, terlepas dari individu yang melaksanakannya Kusmanadji (2004 : 4).

Tanpa adanya standar etika yang telah dirumuskan dalam Kode Etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Misalnya, ketika setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing, atau bila menipu dan berbohong dianggap perbuatan baik, maka akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, nilai etika atau Kode Etik diperlukan oleh auditor agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

2.5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat pengawasan intern pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit Pengawasan Intern pada Kementrian/Kementrian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretarian Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan AAIP (2013). Pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah yaitu melakukan pengawasan keuangan Bolang et al (2013).

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit yang semakin berkualitas. Dalam rangka

mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandate penugasan masing-masing APIP. Untuk menjaga mutu hasil audit intern yang dilaksanakan oleh Auditor Intern Pemerintah, perlu disusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Standar Audit.

2.6. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Berdasarkan Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigasi meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan audit harus independen, objektif, memiliki keahlian (latar belakang, pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik.

Standar Audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandate serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultasi (*consulting activities*). Audit internal adalah aktivitas independen serta keyakinan objektif, dan kondisi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dan tujuan organisasi Halim et al (2016). Standar Audit terdiri dari dua bagian utama, sebagai berikut :

a. Standar Atribut (*Attribute Standards*)

Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum.

b. Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*)

Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar pelaksanaan dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern. Lingkup kegiatan yang diatur dalam Standar Pelaksanaan ini meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (Quality Assurance Activities) dan Pemberi Jasa Konsultasi (Consulting Activities).

2.7. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2(dua) komponen, yaitu: 1) Prinsip-prinsip perilaku auditor, dan 2) Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. Dalam APIP ini auditor harus mematuhi dari setiap prinsip-prinsip perilaku yang ada yaitu : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi.

1. Prinsip Perilaku Auditor

a. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Dalam integritas pemeriksa harus taat aturan walaupun tidak sedang diawasi, pemeriksa tidak mempertimbangkan keadaan seseorang, pemeriksa memiliki rasa tanggung jawab, pemeriksa harus taat pada peraturan-peraturan, dan pemeriksa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun.

b. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Dalam obyektivitas pemeriksa dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan, pemeriksa tidak dipengaruhi oleh pandangan subyektif pihak-pihak lain, pemeriksa dalam melakukan tindakan atau dalam proses pengambilan keputusan menggunakan pikiran yang logis, pemeriksa dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, dan harus dapat di andalkan dan dipercaya.

c. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Dalam kerahasiaan pemeriksa harus secara hati-hati menggunakan segala informasi yang diperoleh, pemeriksa harus menjaga segala informasi yang diperoleh, pemeriksa tidak diperkenankan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi, pemeriksa dapat mengungkapkan informasi yang diperoleh apabila mendapat otoritas yang memadai, dan pemeriksa tidak diperkenankan menggunakan informasi yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Dalam mutu personal pemeriksa harus mampu bekerja dalam tim, memiliki rasa ingin tahu yang besar, sebagai pemeriksa harus mampu dan telah memenuhi kualifikasi personel, mampu menganalisis dengan cepat dalam mengaudit suatu objek pemeriksaan, dan mampu meningkatkan kualitas jasa. Dalam pengetahuan umum pemeriksa harus melakukan audit yang baik, pemeriksa harus memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), harus memiliki kemampuan melakukan review analitis. Dan dalam keahlian khusus dibutuhkan pemeriksa yang harus memahami ilmu statistik, keahlian menggunakan computer, mampu membuat laporan audit dengan baik, memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit dan juga memiliki sertifikat.

1. Aturan Perilaku Auditor

a. Integritas

Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab, harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.

b. Obyektivitas

Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.

c. Kerahasiaan

Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya, tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. Kompetensi

Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya, harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).

1.8. Kinerja Auditor

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (LAN,2003;3). Pengaruh dari kinerja auditor antara lain ketetapan waktu dalam penyelesaian audit, kualitas temuan pemeriksaan yang dilaporkan oleh auditor tampilan secara utuh atas perusahaan selama periode tertentu dan efisiensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penggunaan sistem informasi.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja auditor adalah hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya, dan menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Faktor-faktor yang memiliki indikasi terhadap kinerja auditor antara lain : struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, pemahaman *good governance* , gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi Febriani *et al* (2016).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendiskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi dilingkungan Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan Sugiyono (2013: 29).

Pendekatan Kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Sugiyono (2013: 23) metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan.

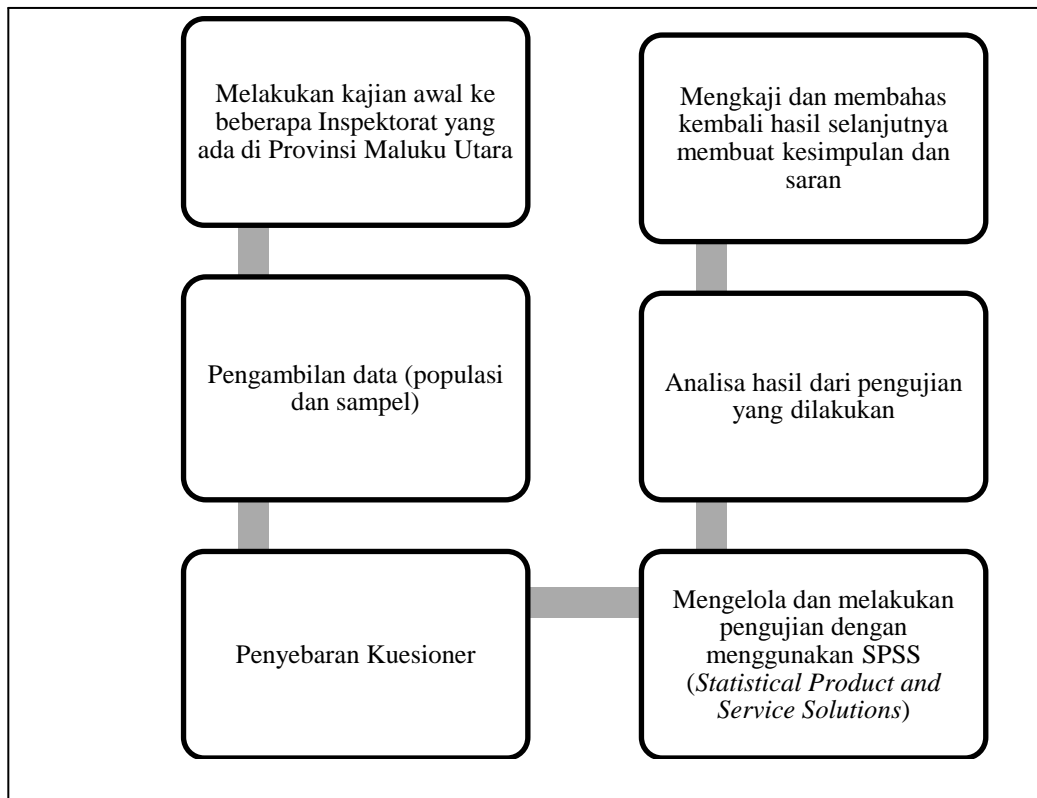
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang beralamat di Puncak Gosale, Sofifi Provinsi Maluku Utara, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2017.

3.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Prosedur Penelitian



Sumber : *Data Olahan, 2017.*

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Rachmat Trijono (2015: 30) menyatakan Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Tabel 3.1
Data Auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara

No	Bidan Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Jumlah Auditor
1	Auditor Pertama	20
2	Auditor Madya	2
3	Auditor Muda	22
	Jumlah	44

Sumber : *Data Olahan, 2017.*

3.4.2. Sampel

Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi relatif kecil yaitu 44 auditor maka semua populasi dijadikan sampel, teknik ini disebut sampel jenuh atau sensus Sugiyono (2016 : 118), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek berupa hasil kuesioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, berupa data atau kuesioner peneliti dan jawaban responden melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan pada yang menjadi objek penelitian. Melakukan kunjungan atau pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya melakukan wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan instansi Inspektorat Provinsi Maluku Utara mengenai data yang ada sangkut-pautnya dengan masalah yang akan dibahas.
2. Kuesioner yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Kode Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Kuesioner dalam penelitian ini memuat pernyataan yang berbentuk tanggapan dengan menggunakan skor skala likert empat poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Rentang nilai untuk mengukur tanggapan responden atas pernyataan dalam kuesioner adalah nilai satu (1) untuk jawaban sangat tidak setuju sampai dengan lima (5) untuk jawaban sangat setuju.

3.6. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Azwar (1999) yang dikutip dalam Wibowo (2012 : 36), jika suatu item memiliki nilai capaian korelasi minimal 0,30 dianggap memiliki daya pembeda yang cukup memuaskan atau dianggap valid. Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan digunakan diambil dari distribusi signifikan 5%, yaitu 0,316.
2. Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas juga dapat berarti indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak. Apabila α positif dan $\alpha > r_{tabel}$ atau jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel Wibowo (2012 : 52).

3.7. Metode Analisis

Sebelum melakukan pengujian dengan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data telah memiliki distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu metode Kolmogrov-Smirnov. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan p value yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika p value > 0.05, begitu juga sebaliknya.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0.1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 0$ maka $Tolerance = 1/10$ atau 0.1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang digunakan diantaranya yaitu uji park, uji glejser, melihat pola grafik regresi dan uji koefisien korelasi spearman, pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan mengamati grafik scatterplot.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas) dan memperoleh hasil yang wajar (qualified), maka analisis regresi dapat dilaksanakan. Hasil data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan diolah kedalam bentuk angka-angka dengan metode statistik yang menggunakan bantuan SPSS.

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b^1 X1 + b^2 X2 + b^3 X3 + b^4 X4 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Auditor

X1 : Integritas

X2 : Obyektivitas

X3 : Kerahasiaan

X4 : Kompetensi

b¹ : Koefisien Regresi X1

b² : Koefisien Regresi X2

b³ : Koefisien Regresi X3

b⁴ : Koefisien Regresi X4

a : Konstanta

e : Error

3.7.2 Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besaran yang dapat menyatakan seberapa kuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien korelasi (R) harus terdapat dalam batas antara -1 sampai +1. Tanda positif menunjukkan korelasi positif atau korelasi langsung antara kedua variabel yang berarti setiap kenaikan nilai X akan diikuti kenaikan nilai Y, demikian pula sebaliknya, yaitu tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif atau korelasi inversi yang berarti setiap kenaikan nilai X akan diikuti penurunan nilai Y.

3.7.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variasi variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai RZ yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Adapun secara keseluruhan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan computer dengan software program SPSS version 21.0 for windows, tanpa menggunakan perhitungan manual.

Dalam menilai kekuatan dari hubungan yang dimiliki antar variabel tersebut, maka dapat dilihat dari interprise nilai berikut:

0,00 – 0,199 : Sangat Rendah

0,20 – 0,399 : Rendah

0,40 – 0,599 : Sedang

0,60 – 0,799 : Kuat

0,80 – 1,00 : Sangat Kuat

3.7.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai variabel yang dipakai, dan penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kode etik apip terhadap kinerja auditor. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kode etik apip secara parsial dan simultan terhadap kinerja auditor digunakan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t, dan secara simultan dengan uji F.

1. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

Ho1 : $\beta=0$, Integritas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ha1 : $\beta \neq 0$, Integritas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ho2 : $\beta \neq 0$, Obyektivitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ha2 : $\beta \neq 0$, Obyektivitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ho3 : $\beta \neq 0$, Kerahasiaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ha3 : $\beta \neq 0$, Kerahasiaan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ho4 : $\beta \neq 0$, Kompetensi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Ha4 : $\beta \neq 0$, Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor.

Untuk mencari t tabel dengan $df = N-2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t . Dasar pengambilan keputusan adalah :

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

2. Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut :

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya keempat variabel tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor.

H_a : $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, artinya keempat variabel berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor.

Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji secara sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan $[df]_1$ dan $[df]_2$ untuk mencari nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

Jika F hitung > F tabel, H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jika F hitung < F tabel, H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.8. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang diukur atau diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.8.1. Definisi Operasional

Variabel Independen yaitu Integritas (X1), Obyektivitas (X2), Kerahasiaan (X3), dan Kompetensi (X4) yang merupakan faktor-faktor dari kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan satu variabel dependen yaitu Kinerja Auditor (Y).

3.8.2. Pengukuran Variabel

Keseluruhan uraian mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Dependen		
Kinerja Auditor (Y)	Adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.	Auditor harus mampu melaksanakan dan mempertanggung jawabkan tugasnya secara jujur kualitas dan kuantitas.
Independen		

Variabel	Definisi	Indikator
Integritas (X ₁)	Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit.	1. Auditor harus memiliki sikap yang jujur. 2. Auditor harus memiliki sikap yang berani, dan 3. Auditor harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan audit.
Obyektivitas (X ₂)	Obyektivitas adalah kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.	Auditor harus melakukan kewajibannya dengan jujur dan tidak memihak.
Kerahasiaan (X ₃)	Kerahasiaan adalah auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.	Auditor harus menjaga informasi yang diterimanya seakurat mungkin.
Kompetensi (X ₄)	Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.	Auditor harus mengikuti program-program pengembangan untuk menambah keahlian mereka dalam melakukan audit.

Sumber : Data Olahan, 2017.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Responden

1. Tabel Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	44	100%
Kuesioner yang kembali	40	90.9%
Kuesioner yang digunakan	40	90.9%

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

2. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	20	50.0	50.0	50.0
Valid Perempuan	20	50.0	50.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Pada jenis kelamin Laki-laki frekuensi auditor 20 dengan persentase 50,0% dari 40 auditor. Sedangkan jenis kelamin Perempuan frekuensinya 20 dengan 50,0%.

3. Komposisi Responden Berdasarkan Usia

Usia				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-39 Tahun	10	25.0	25.0	25.0
Valid 40-59 Tahun	30	75.0	75.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Dapat dilihat dari tabel diatas Peneliti membuat dua kelompok umur dimana pada kelompok pertama umur 20-39 Tahun berjumlah 10 auditor dengan persentase 25,0%. Sedangkan pada kelompok kedua kelompok umur 40-59 Tahun berjumlah 30 auditor dengan jumlah persentase 75,0%.

4. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	1	2.5	2.5	2.5
Valid S1	32	80.0	80.0	82.5
Valid S2	7	17.5	17.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Dari tabel diatas diperoleh tingkat pendidikan untuk S2 (strata dua) berjumlah 7 orang dengan hasil persentase 17,5%, sedangkan tingkat pendidikan S1 (strata satu) yaitu berjumlah 32 orang dengan hasil persentase 80,0% dan SMA 1 orang dengan hasil persentase 2,5%.

5. Komposisi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

latar belakang pendidikan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Akuntansi	13	32.5	32.5	32.5
Valid Non Akuntansi	27	67.5	67.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Tabel diatas menunjukkan latar belakang pendidikan responden dengan dua kategori yaitu Akuntansi dan Non Akuntansi, dari 40 responden yang berlatar belakang Akuntansi 32,5% atau berjumlah 13 orang, sedangkan latar belakang Non Akuntansi 67,5% atau berjumlah 27 orang. Dapat dilihat bahwa yang berlatar belakang akuntansi sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.\

4.1.2. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel 5%	Data
x.1.1	0.847	0.316	Valid
x.1.2	0.817	0.316	Valid
x.1.3	0.879	0.316	Valid
x.1.4	0.904	0.316	Valid
x.1.5	0.805	0.316	Valid
x.2.1	0.855	0.316	Valid
x.2.2	0.829	0.316	Valid
x.2.3	0.864	0.316	Valid
x.2.4	0.886	0.316	Valid
x.2.5	0.773	0.316	Valid
x.3.1	0.830	0.316	Valid
x.3.2	0.885	0.316	Valid
x.3.3	0.863	0.316	Valid
x.3.4	0.611	0.316	Valid
x.3.5	0.695	0.316	Valid
x.4.1	0.650	0.316	Valid
x.4.2	0.802	0.316	Valid
x.4.3	0.576	0.316	Valid
x.4.4	0.568	0.316	Valid
x.4.5	0.618	0.316	Valid
x.4.6	0.718	0.316	Valid
x.4.7	0.701	0.316	Valid
x.4.8	0.686	0.316	Valid
x.4.9	0.505	0.316	Valid
x.4.10	0.403	0.316	Valid
x.4.11	0.747	0.316	Valid
x.4.12	0.583	0.316	Valid
x.4.13	0.603	0.316	Valid
x.4.14	0.544	0.316	Valid
x.4.15	0.582	0.316	Valid
y.1.1	0.504	0.316	Valid
y.1.2	0.712	0.316	Valid
y.1.3	0.792	0.316	Valid
y.1.4	0.632	0.316	Valid
y.1.5	0.481	0.316	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Setelah diolah menggunakan alat bantu SPSS, hasil uji validitas diatas menunjukkan semua kuesioner valid dengan dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data valid.

2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka data tidak valid. Didapati r_{tabel} yang diambil dari distribusi signifikan 5%, yaitu 0.316. Sedangkan r_{hitung} di uji lewat SPSS 21.0 memiliki nilai yang berbeda-beda seperti yang disajikan dalam tabel. Berdasarkan hasil uji validitas maka semua data dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
1	Integritas(X ₁)	0.904	Reliabel
2	Obyektivitas(X ₂)	0.895	Reliabel
3	Kerahasiaan(X ₃)	0.834	Reliabel
4	Kompetensi(X ₄)	0.880	Reliabel
5	Kinerja Auditor(Y)	0.606	Reliabel

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Berdasarkan uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan statistik Cronbanch Alpha. Wibowo (2012 : 52) menyatakan bahwa konstruk akan dikatakan reliabel jika memenuhi Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60. Pada tabel dapat dilihat hasil uji reabilitas. Data tersebut menunjukkan bahwa semua nilai Cronbach Alpha diatas 0.60 berarti dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44150866
	Absolute	.109
Most Extreme Differences	Positive	.109
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.690
Asymp. Sig. (2-tailed)		.728

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Uji normalitas Kolmogrov-Smirnov menggunakan nilai Asymp.Sig (2-Tailed), yang nilai tersebut harus diatas tingkat alpha yaitu 0. Selain itu dilihat dari nilai Kolmogrov-Smirnov, apakah signifikan terhadap Asymp.Sig (2-Tailed) atau tidak. Hasil dari analisis uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.8 nilai signifikansi 0,728 > 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

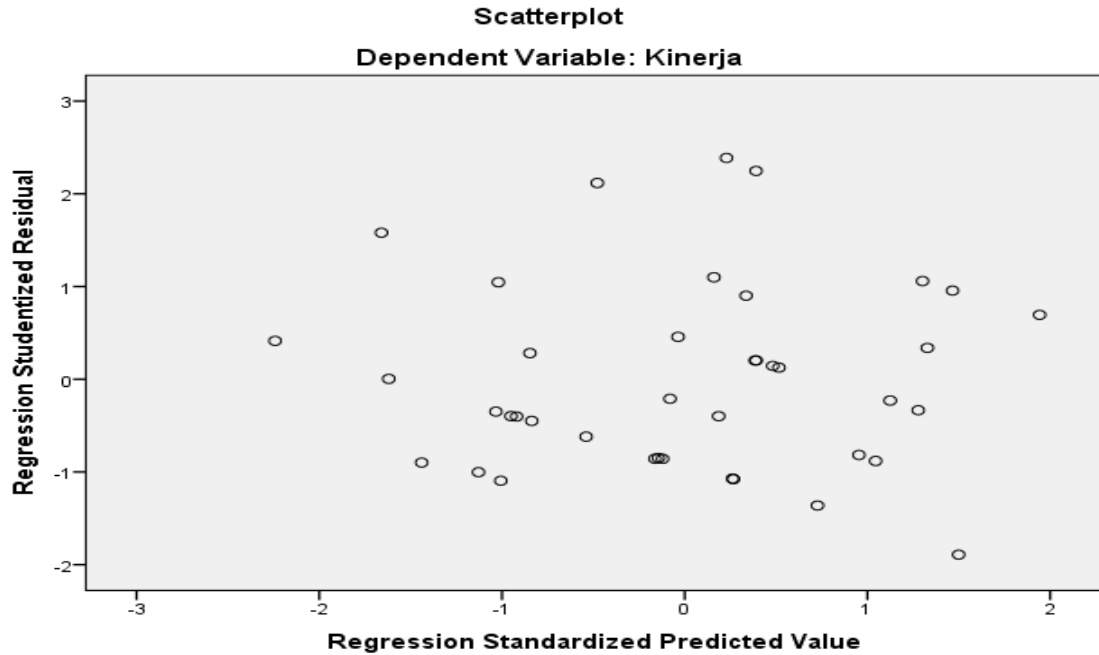
2. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Integritas	0.520	1.922
Obyektivitas	0.988	1.012
Kerahasiaan	0.508	1.968
Kompetensi	0.952	1.050

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat diketahui apakah terjadi masalah multikolinearitas atau tidak dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *VIF*. Nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Pada gambar diatas terlihat grafik *scatterplot* dari Inspektorat yang menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak disekitar angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga data yang diolah adalah homoskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.760	2.552		3.433	.002
Integritas	-.136	.118	-.232	-1.151	.257
Obyektivitas	.216	.097	.325	2.220	.033
Kerahasiaan	.195	.127	.312	1.530	.135
Kompetensi	.070	.040	.262	1.756	.088

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 8.760 + (- 0.136)x_1 + 0.216x_2 + 0.195x_3 + 0.070x_4$$

Dimana :

Y = Kinerja Auditor

X₁ = Integritas

X₂ = Obyektivitas

X₃ = Kerahasiaan

X₄ = Kompetensi

Perhitungan analisis regresi berganda data variabel Kode Etik APIP atas Kinerja Auditor menghasilkan arah regresi b1 sebesar (-0,136) untuk variabel X₁ (Integritas), b2 sebesar 0,216 untuk variabel X₂ (obyektivitas), b3 sebesar 0,195 untuk variabel X₃ (Kerahasiaan), b4 sebesar 0,070 untuk variabel X₄ (Kompetensi), serta konstanta a sebesar 8,760.

5. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 ^a	.259	.174	1.52165

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Pedoman dalam memberikan interpretstasi hubungan terhadap koefisien korelasi, dimana apabila nilai koefisien berada diantara 0,80 – 100 maka nilai tersebut berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Berdasarkan tabel diatas analisis koefisien korelasi (R) menghasilkan nilai koefisien korelasi 0,509 yang berarti bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat karena lebih dari 0.

Nilai determinasi yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,124 atau 12,4%. Angka itu memberikan arti bahwa variasi atau perubahan dalam kinerja auditor dapat dijelaskan oleh variasi dari kode etik apip, sedangkan sisanya 87,6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

6. Uji Hipotesis

1. Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.760	2.552		3.433	.002
Integritas	-.136	.118	-.232	-1.151	.257
1 Obyektivitas	.216	.097	.325	2.220	.033
Kerahasiaan	.195	.127	.312	1.530	.135
Kompetensi	.070	.040	.262	1.756	.088

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

- a. Hipotesis Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel integritas (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar -1,151. Berdasarkan tabel t, menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, dapat disimpulkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,151 < 2,030) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,257 > 0,05$ maka H_01 diterima H_{a1} ditolak. Ini berarti secara parsial integritas (X_1) tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor (Y).
- b. Hipotesis Pengaruh Obyektivitas Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel obyektivitas (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 2,220. Berdasarkan tabel t, menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, dapat disimpulkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,220 > 2,030) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$ maka H_02 ditolak H_{a2} diterima. Ini berarti secara parsial obyektivitas (X_2) berpengaruh terhadap kinerja auditor (Y).
- c. Hipotesis Pengaruh Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kerahasiaan (X_3) memiliki t_{hitung} sebesar 1.530. Berdasarkan tabel t, menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, dapat disimpulkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,530 < 2,030) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,135 > 0,05$ maka H_03 diterima H_{a3} ditolak. Ini berarti secara parsial kerahasiaan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor (Y).
- d. Hipotesis Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi (X_4) memiliki t_{hitung} sebesar 1,756. Berdasarkan tabel t, menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, dapat disimpulkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,756 < 2,030) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,088 > 0,05$ maka H_04 diterima H_{a4} ditolak. Ini berarti secara parsial kompetensi (X_4) tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor (Y).

2. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	28.335	4	7.084	3.059	.029 ^b
Residual	81.040	35	2.315		
Total	109.375	39			

Sumber : Hasil olahan data SPSS 21.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan tabel F_{hitung} yaitu 3,059 dan F_{tabel} sebesar 2,69 ($3,059 > 2,69$) dengan nilai signifikansi $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis satu diketahui bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor dilihat dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,151 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,257 > 0,05$. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tidak mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2015) bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang handal auditor dituntut untuk tetap berani, jujur, bijaksana, dan bertanggungjawab.

4.2.2 Pengaruh Obyektivitas Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang kedua diketahui bahwa obyektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor dilihat dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,220 > 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa didalam proses pengambilan keputusan auditor dituntut untuk selalu berpedoman pada fakta yang ditemukan serta tanpa adanya intervensi atau permintaan pihak tertentu atau pribadi, sehingga laporan audit yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) yang menyatakan bahwa obyektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor.

4.2.3 Pengaruh Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang ketiga diketahui bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor dilihat dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,530 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,135 > 0,05$. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Erina (2012) bahwa kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam prinsip ini auditor dituntut untuk berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ketidaksignifikan hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erina (2012).

4.2.4 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang keempat diketahui bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor dilihat dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,756 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,088 > 0,05$. Hal ini berbeda dan dengan penelitian sebelumnya Prameswari (2015) bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor, pengetahuan dan kemampuan merupakan kompetensi yang dibutuhkan auditor dalam melaksanakan audit. Maka penelitian tidak mendukung hasil dari penelitian sebelumnya Prameswari (2015) yang menyakatan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja internal auditor pemerintah.

4.2.5 Pengaruh Kode Etik APIP Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Berdasarkan tabel uji F dapat dilihat bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel integritas (X_1), obyektivitas (X_2), kerahasiaan (X_3), dan kompetensi (X_4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Y). Dalam pengujian menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 3,059. Berdasarkan tabel F , menunjukkan F_{tabel} sebesar 2,69 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,059 > 2,69$) dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Maka integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil Pengujian hipotesis pertama menyatakan variabel integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Variabel integritas memiliki t_{hitung} sebesar -1,151. Berdasarkan tabel t , menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,151 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,257 > 0,05$ maka H_{o1} diterima H_{a1} ditolak.
2. Hasil Pengujian hipotesis kedua menyatakan variabel obyektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Variabel obyektivitas memiliki t_{hitung} sebesar 2,220. Berdasarkan tabel t , menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,220 > 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$ maka H_{o2} ditolak H_{a2} diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya obyektivitas dalam suatu kinerja maka akan menghasilkan auditor yang adil dan bijaksana.
3. Hasil Pengujian hipotesis ketiga menyatakan variabel kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Variabel integritas memiliki t_{hitung} sebesar 1,530. Berdasarkan tabel t , menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,530 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,135 > 0,05$ maka H_{o3} diterima H_{a3} ditolak.
4. Hasil Pengujian hipotesis keempat menyatakan variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Variabel kompetensi memiliki t_{hitung} sebesar 1,756. Berdasarkan tabel t , menunjukkan t_{tabel} sebesar 2,030. Jadi, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,756 < 2,030$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,088 > 0,05$ maka H_{o4} diterima H_{a4} ditolak.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa integritas, kerahasiaan dan kompetensi adalah variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah dan hanya obyektivitas yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

1.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Inspektorat Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat lebih efektif dan meningkatkan perhatian terutama pada integritas, kerahasiaan dan kompetensi para auditornya sehingga mampu untuk menjaga dan meningkatkan kinerja auditornya.
2. Dapat memberikan masukan bahwa untuk peneliti selanjutnya dapat mengemukakan variabel-variabel yang lain diluar penelitian ini. Sehingga terus diperbaharui dan dapat berguna bagi pemerintahan dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya Provinsi Maluku Utara untuk mengembangkan setiap potensi yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Ananda, 2014. *Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan Pada Kode Etik Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPKP perwakilan Sumatera Utara)*. Jurnal Nasional. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sumatera Utara.
- Ariani, K.G., Badera I.D.N., 2015. *Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali.
- Bolang, M.,S. Sondakh, J.,J. Morasa, J. 2013. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,Unsrat.
- Bratten, B., et al., 2013. *The Audit Of Fair Values And Other Estimates, The Effects of Underlying Enviromental, Task, and Auditor- Specific Factors*. Auditing : A Journal Of Practice & Theory. 32 (Supplement1), 7-44.
- Beest F,V, Braam, G. & Boelens, S 2009. *Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Charateristics*. Universitas Nijmegen. Nice Working Paper.
- Erina, C., 2012. *Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Aceh)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Sumatera.
- Einvani, F. and Emami, M. 2012. African Journal of Business Management. Vol.6(29). 8475-8482. Diakses 15 Oktober 2015
- Fidelius, 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen. Vol. 1 No.4, Desember 2013.
- Febriani, A., Budiarta, I., K. 2016. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Haq, R,A., 2012. *Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Nasional Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Hoeck V.N, Betgas E., Steen J., Kestermont J., Vandekerckhove M., Overwalle V.F., 2014. *False Balief and Counterfactual Reasoning in a social environment*. Vrije Universiteit Brussel. Belgium.
- Halim, A., Wulandari, R., 2016. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang)*. Jurnal Riset Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Politeknik Kanjuruhan. Malang.
- Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang *Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kusmanadji. 2004. *Etika, Profesi Akuntansi, Bisnis, Dan Pelayanan Publik*. Jakarta : STAN.
- Lillrank Paul. 2003. *The Quality Of Information*. University Of Technology. Finland.
- Masran, H., Pagalung, G., Habbe, A,H., 2012. *Pengaruh Kompetensi, Integritas, Objektivitas Dan Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Nasional Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hassanudin, Makassar.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-4, Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mustikawati, D., 2013. *Pengaruh Etika Profesional, Akuntabilitas, Kompetensi Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 No.12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.

-
- Mu'azu, S.B., and Siti Z.S., 2013. *The Relationship between Audit Experience and Internal Audit Effectiveness in the Public Sector Organizations*. *Internasional Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(3) : h: 329-339.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Permatasari, W., Wasito., Andriana., 2016. *Pengaruh Independensi, Motivasi, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, Kalimantan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP)*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008.
- Putra, S., G., 2016. *Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesioanal, Kepatuhan Pada Kode Etik, Dan Komitmen Profesional Terhadap Kualitas Pemeriksa Keuangan Daerah Pada Inspektorat Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Umrah Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Prameswari, D,A., Rafki, Nazar., 2015. *Pengaruh Penerapan Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI)*. *Jurnal Nasional Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Telkom*.
- Priyansari, A., Tah, N., 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit.(Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Nasional Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*. Semarang.
- Reeve, James M, Carl S. Warren, Jonathan E Duchac. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Buku 2. Jakarta: Indeks
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sugmadilaga, C., Pratama, A., Mulyani, S. 2015. *Good Governance Implementation In Public Sector : Exploratory Analysis of Government Financial Statement Disclosures Across ASEAN Countries*. *Procedia Social and Behavioral Sciences Universitas Padjajaran*. Bandung.
- Trijono, Rachmat 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Papar Sinar Sinanti. Jakarta.
- Tanjung, Abdul. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Alfabet, Bandung.
- Utami, U.,I., 2015. *Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Riau*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru*.
- Weygandt, Jerry J, Kimmel, Paul D., Kieso, Donald E, 2012. *Financial Accounting*. IFRS ed, Hoboken : John Wiley & Sons, Inc.
- Warren, Carl S. 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Wibowo, Agung Edi, 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Penerbit Gaya Media. Batam.
-

Yadnya, IP.P., Ariyanto., 2017. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kinerja Auditor Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. E-jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.